



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

---

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. Marsianus Jawa, M.Si**  
Jabatan : **Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ayodhia G.L. Kalake**  
Jabatan : **Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur**

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.




Kupang, 20 Februari 2024




Pihak Kedua,

  
**Ayodhia G. L. Kalake**

Pihak Pertama,

  
**Drs. Marsianus Jawa, M.Si**

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten 3 Sekda	
Kepala Biro Organisasi	

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Kasubag Kepegawaian dan Umum	
Perencana Ahli Muda	

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**A. Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam RENSTRA/IKU Perangkat Daerah**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI		TARGET	FORMULA INDIKATOR
			2023	2024		
1	2	3	4	5	6	
1.	Meningkatnya realisasi investasi	Penambahan nilai realisasi investasi	5,24%	5,7 Triliun		Realisasi investasi PMA dan PMDN tahun berjalan
		Laju pertumbuhan PMDN	2,39%	0,7 %		Realisasi investasi PMDN tahun berjalan – realisasi investasi PMDN tahun sebelumnya/Realisasi investasi PMDN tahun sebelumnya x 100%
		Laju pertumbuhan PMA	2,39%	0,3 %		Realisasi investasi PMA tahun berjalan – realisasi investasi PMA tahun sebelumnya/ Realisasi investasi PMA tahun sebelumnya x 100%
		Persentase izin dan non izin yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP	154,06%	100%		Jumlah izin yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP/Jumlah Total izin yang diterbitkan x 100%
2.	Terwujudnya kepuasan layanan perizinan dan non perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95	95		Nilai IKM hasil survey tahun berjalan
		Jumlah inovasi layanan	5	1		Inovasi yang dikembangkan

## B. Pelaksanaan Anggaran

No	Uraian	Alokasi	Keterangan
1.	<b>APBD</b>		
	<b>a) Belanja (Program)</b>	<b>Rp. 10.122.645.880,-</b>	<b>Realisasi minimal 85%</b>
	1. Penujang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 7.653.047.410,-	Realisasi minimal 90%
	2. Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 410.000.000,-	Realisasi minimal 90%
	3. Promosi Penanaman Modal	Rp. 85.000.000,-	Realisasi minimal 90%
	4. Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 405.354.470,-	Realisasi minimal 90%
	5. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 1.469.244.000,-	Realisasi minimal 90%
	6. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 100.000.000,-	Realisasi minimal 90%
	<b>b) Pendapatan</b>	<b>Rp. -</b>	<b>-</b>
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp. 10.122.645.880,-</b>	<b>Realisasi minimal 85%</b>
2.	<b>APBN</b>		
	<b>a) Program Dekonsentrasi</b>	<b>Rp. 448.892.000,-</b>	<b>Realisasi minimal 90%</b>
	1. Penanaman Modal	Rp. 286.886.000,-	Realisasi minimal 90%
	2. Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	Rp. 162.006.000,-	Realisasi minimal 90%
	<b>b) Program Tugas Pembantuan</b>	<b>Rp. -</b>	<b>-</b>
	<b>Jumlah Dekonsentrasi</b>	<b>Rp. 448.892.000,-</b>	<b>Realisasi minimal 90%</b>

C. Belanja menggunakan Aplikasi *E-Purchasing* (e-catalog dan toko daring) minimal 40% dari Pagu Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah;

D. Pengadaan barang dan jasa yang sudah terkontrak harus direalisasi 100% pertanggal 31 Desember Tahun 2024;




E. Penyampaian LKSKPD paling lambat Tanggal 26 Januari 2024, sedangkan LKPJ, LPPD dan LKIP paling lambat Tanggal 12 Februari 2024;

F. Penyampaian LHKPN dan SPT Tahunan paling lambat Tanggal 31 Maret 2024;

- G. Nilai SAKIP Minimal BB (>70-80);
- H. Rata-rata realisasi Kinerja Individu dalam SKP minimal Predikat BAIK;
- I. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dan APJP sebagai berikut:
  1. TL rekomendasi Tahun 2024: Administrasi 100%, Keuangan 80%;
  2. TL rekomendasi dibawah Tahun 2024: Administrasi 100%, Keuangan 80%;
- J. Jumlah Inovasi Perangkat Daerah Minimal 5 (lima) Jenis;
- K. Penciptaan arsip elektronik (korespondensi surat masuk dan surat keluar) melalui aplikasi SRIKANDI minimal 80%;
- L. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Minimal Kategori Baik (76,61-88,30);
- M. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Minimal Kategori Menuju Informatif (80-89,99);
- N. Jumlah Kerjasama dengan Lembaga Mitra/NGO/LSM/PIhak Lain yang mendukung Pencapaian Target IKU Perangkat Daerah.

Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur,



  
 Ayodhia G. L. Kalake

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten 3 Sekda	
Kepala Biro Organisasi	

Kupang, 20 Februari 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur,

  
 Drs. Marsianus Jawa, M.Si

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Kasubag Kepegawaian dan Umum	
Perencana Ahli Muda	